

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Alamat : Jl. Mayjen. S. Parman No. 2 Kendari (93121) Telp.

Nomor Telepon : 0401-3126053 Fax (0401) 3126182

Website : www.dpmptsp.sultraprov.go.id

E-mail : info.dpmptsp@sultraprov.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kendari, 14 Februari 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	5
1.3 Dasar Hukum	6
1.4 Sistematika Laporan Kinerja.....	6
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	8
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III	22
AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja	22
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	23
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	23
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	25
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	27
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	29

3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan...	30
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	36
3.2	Realisasi Anggaran.....	50
BAB IV		63
PENUTUP		63
LAMPIRAN		67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	8
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	9
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	13
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n.....	14
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	23
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	23
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	27
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	29
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	30
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	34
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	36
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara	5
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang

dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina dan melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai peraturan perundang-undangan; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara membawahi lima eselon III meliputi:
 - a. Sekretaris
 - b. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal.
 - d. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
- 2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program perencanaan, urusan keuangan, urusan umum dan kepegawaian lingkup dinas. Sekretariat terdiri atas 1 Sub Bagian dan 2 Jabatan Fungsional meliputi:
 - a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - b. Analis Perencana Ahli Muda
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan provinsi Sultra. Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai 1 seksi masing-masing :
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda
- 4. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan iklim, promosi penanaman modal yang mencakup 3 Seksi yaitu:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal.
- 5. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi melingkupi 3 seksi yaitu :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Penata Komputer Ahli Muda

6. Bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan didukung oleh 3 seksi yaitu:

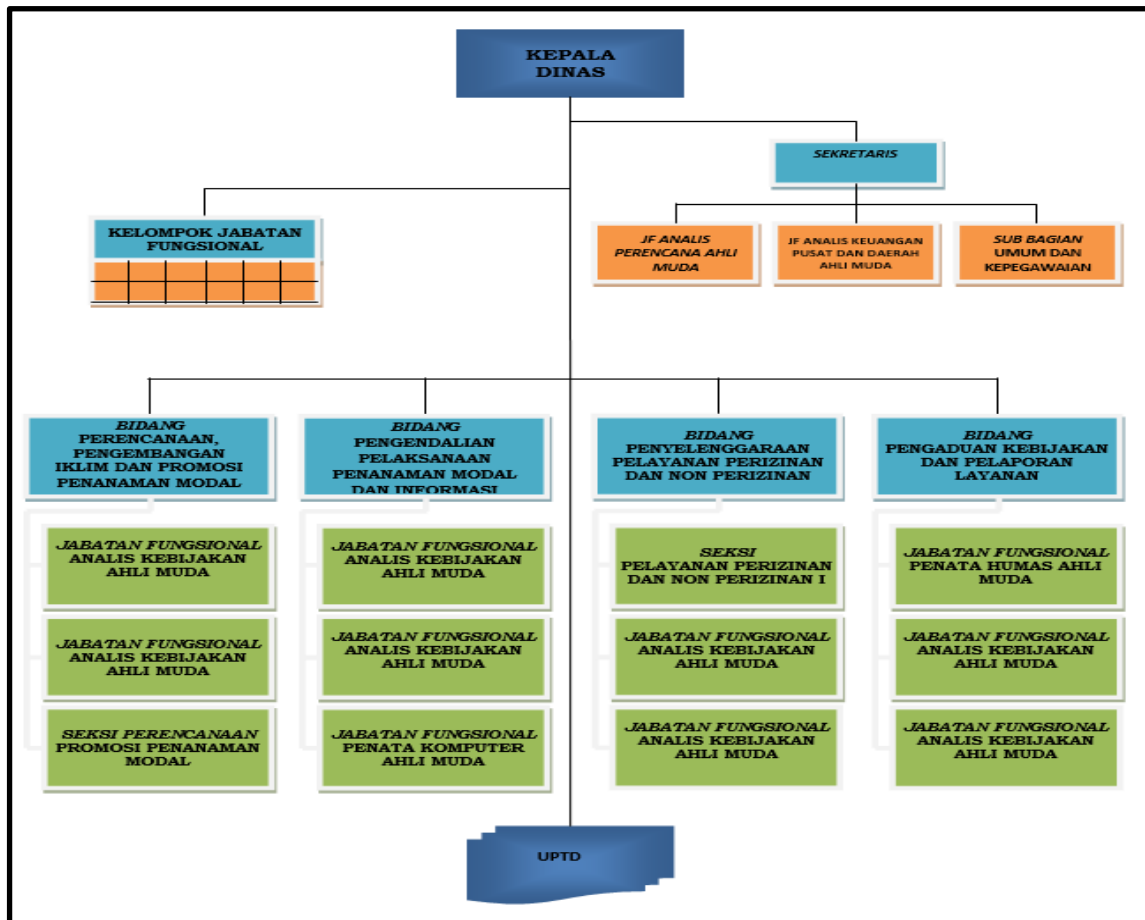
- a. Penata Humas Ahli Muda
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda
- c. Analis Kebijakan Ahli Muda

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. Pemberian informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- d. Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan ;
- e. Pelaksanaan layanan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp. 12.844.893.358,00

Sumber	Tahun	Jumlah
APBD	Tahun n	Rp. 14.000.130.152,00
APBN	Tahun n-1	Rp 482.878.000,00
APBN	Tahun n	Rp 453.846.000,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Surat Sekretariat Daerah Nomor 000.8.6.3/428 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah untuk mempermudah proses birokrasi pelayanan pengurusan perizinan. Dengan demikian, mereka berusaha mengurangi waktu pelayanan dan menghilangkan tahapan-tahapan yang kurang penting dalam proses perizinan. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2024	2025	2026	target_4	target_5
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	1.2.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Pertumbuhan Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	21.73	22.5	23	target_renstra_4#1	target_renstra_5#1
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.3.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	73	75	80	target_renstra_4#2	target_renstra_5#2

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2024 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	1.2.1 #.1	Pertumbuhan Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)				
1.2.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	1.2.1.1#0.1	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah	Yang dimaksud jumlah investasi adalah jumlah proyek investasi di Provinsi baik PMDN dan PMA n : tahun sekarang n1 : tahun sebelumnya	(jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n - 1) di provinsi Di bagi jumlah investasi tahun n - 1 di provinsi dikalikan 100 Persen	RENSTR A DPMPTS P 2024-2026
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.3.1 #.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				
1.3.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.3.1.1#0.1	Nilai AKIP PD	nilai	Peningkatan ini diukur melalui indikator-indikator seperti tingkat kepuasan masyarakat terhadap	Nilai SAKIP = (Perencanaan Kinerja) + (Pengukuran kinerja) + (Pelaporan Kinerja) + (Evaluasi	Inspektora dan Menpan RB

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					layanan publik, jumlah kasus korupsi yang berhasil diungkap, dan tingkat keterbukaan data pemerintah.	Kinerja) + (Capaian Kinerja) Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP	
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.3.2 #.1	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	nilai	Untuk mendapatkan indeks kepuasan pelayanan/nilai survei unit pelayanan, ke 9 unsur dari rata-rata tertimbang tersebut dijumlahkan	Rumusnya : Nilai Indeks X Nilai Dasar	Aplikasi SP4N Lapor, Kuisisioner SKM, Aduan Masyarakat pada Web DPMPPTS P
1.3.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PTSP	1.3.2 .1#0.1	Nilai Pelayanan Publik PTSP		Nilai Pelayanan Publik PTSP merujuk pada tingkat kualitas dan efektivitas layanan yang disediakan oleh PTSP kepada masyarakat dan pelaku usaha. Ini diukur melalui beberapa indikator kunci yang mencakup: Waktu Pelayanan, Kep	Rumus Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75 persen Nilai Indeks Formulir - 02+25 persen Nilai Indeks Formulir - 03 Ketentuan : (Nilai Per Aspek dikali Bobot Aspek)	Aplikasi SP4N Lapor, Kuisisioner SKM, Aduan Masyarakat pada Web DPMPPTS P

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					uasan Pengguna, Tran sparansi Proses, Kemudahan Akses, kecepatan tanggapan, Kepatuhan terhadap Regulasi dan Pelatihan dan Kompetensi Petugas.		
1.3.2. 1		1.3.2 .1#0. 2	Indeks Pelayanan PTSP	indeks	Indeks Pelayanan PTSP mengukur kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada masyarakat. Indeks ini mencakup beberapa indikator utama seperti waktu pelayanan, kepuasan pengguna, transparansi proses, kemudahan akses, efisiensi	Rumus Nilai Indek Pelayanan Publik : 75 Persen Nilai Indeks Formulir - 02 + 25 Persen Nilai Indeks Formulir – 03 Ketentuan : (Nilai Per Aspek dikali Bobot Aspek)	Aplikasi SP4N Lapor, Kuisi SKM, Aduan Masyara kat pada Web DPMPTSP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					administrasi, kecepatan tanggapan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kompetensi petugas.		

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun n

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	1.2.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Jumlah investor yang mendapatkan insentif investasi	Juta Rupiah	21.73
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan	1.3.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas / Insentif dibidang penanaman modal	nilai	73

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	Pemerintahan Daerah			yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi		

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Pertumbuhan Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	12.60
1.2.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	21.73

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	62.20
1.3.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP PD	73,00
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	3.25
1.3.2.1		Nilai Pelayanan Publik PTSP	80,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.1 .1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang mendapatkan insentif investasi	2
1.2.1 .1.1. 5	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas / Insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	1
1.2.1 .1.1. 5.1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.1 .1.1. 5.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2
1.2.1 .1.1. 6	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Potensi Investasi unggulan Provinsi Sultra yang Dipetakan	6
1.2.1 .1.1. 6.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1
1.2.1 .1.1. 6.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	1
1.2.1 .1.2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Media Publikasi Promosi Penanaman Modal	4
1.2.1 .1.2. 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	4
1.2.1 .1.2. 1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	
1.2.1 .1.2. 1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4
1.2.1 .1.3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	21.73
1.2.1 .1.3. 2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN	21.73
1.2.1 .1.3. 2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	30
1.2.1 .1.3. 2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	700
1.2.1 .1.3. 2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	42
1.3.1 .1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1 .1.1. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja yang Disusun	13
1.3.1 .1.1. 1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2
1.3.1 .1.1. 1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2
1.3.1 .1.1. 1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1
1.3.1 .1.1. 1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	7
1.3.1 .1.1. 1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1
1.3.1 .1.1. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27
1.3.1 .1.1. 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60
1.3.1 .1.1. 2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12
1.3.1 .1.1. 2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
1.3.1 .1.1. 2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan	1
1.3.1 .1.1. 2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1 .1.1. 2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1
1.3.1 .1.1. 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	3
1.3.1 .1.1. 3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1
1.3.1 .1.1. 3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1
1.3.1 .1.1. 3.3	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1
1.3.1 .1.1. 4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16
1.3.1 .1.1. 4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4
1.3.1 .1.1. 4.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	
1.3.1 .1.1. 4.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1
1.3.1 .1.1. 4.4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1
1.3.1 .1.1. 4.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50
1.3.1 .1.1. 4.6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50
1.3.1 .1.1. 4.7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1 .1.1. 5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	136
1.3.1 .1.1. 5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
1.3.1 .1.1. 5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20
1.3.1 .1.1. 5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2
1.3.1 .1.1. 5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2
1.3.1 .1.1. 5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12
1.3.1 .1.1. 5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan - dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	20
1.3.1 .1.1. 5.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1
1.3.1 .1.1. 5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12
1.3.1 .1.1. 5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50
1.3.1 .1.1. 5.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1
1.3.1 .1.1. 5.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1
1.3.1 .1.1. 6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	20

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1 .1.1. 6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2
1.3.1 .1.1. 6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3
1.3.1 .1.1. 6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5
1.3.1 .1.1. 6.4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1
1.3.1 .1.1. 6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1
1.3.1 .1.1. 6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1
1.3.1 .1.1. 7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan	24
1.3.1 .1.1. 7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2
1.3.1 .1.1. 7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12
1.3.1 .1.1. 7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
1.3.1 .1.1. 7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2
1.3.1 .1.1. 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	47
1.3.1 .1.1. 8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1 .1.1. 8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1
1.3.1 .1.1. 8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20
1.3.1 .1.1. 8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pelihara/ Rehabilitasi	1
1.3.1 .1.1. 8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	3
1.3.1 .1.1. 8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor yang dilaksanakan	3
1.3.2 .1.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Atas Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	84
1.3.2 .1.1. 1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Perizinan dan Non Perizinan yang Disusun	21
1.3.2 .1.1. 1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50
1.3.2 .1.1. 1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Palaku Usaha	1
1.3.2 .1.1. 1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	2
1.3.2 .1.1. 2	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin Kewenangan Daerah Provinsi yang Diterbitkan	500

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.2 .1.1. 2.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	500
1.3.2 .1.1. 2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	2
1.3.2 .1.1. 2.4	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terhadap Terkait Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Kewenangan Daerah Provinsi	5

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Pertumbuhan Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	12,60	2,09	16,58	Sangat Rendah	BPS
1.2.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	21.73	11.05	50,85	Sangat Rendah	Hasil Rilis BKPM RI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)
	investasi PMA dan PMDN						
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	62.20	65.71	105,64	Sangat Tinggi	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah
1.3.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP PD	73.00	75.94	104,03	Sangat Tinggi	Inspektorat dan Menpan RB
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	3.25	2.83	87,08	Tinggi	Kemenpan RB
1.3.2.1		Nilai Pelayanan Publik PTSP	88,00	69,71	79,21	Tinggi	Ombudsman RI

Sumber : *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024*

Uraian penjelasan tabel :

Data yang disajikan menunjukkan hasil evaluasi kinerja di berbagai bidang yang menjadi fokus strategis, yang pertama penurunan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN serta pertumbuhan investasi/PMTB menunjukkan adanya kendala signifikan dalam menarik investasi dari dalam dan luar negeri. Pertumbuhan investasi/PMTB hanya mencapai 44.13% dari target 12.6% (Sumber: BPS), sementara nilai realisasi investasi PMA dan PMDN hanya mencapai 50.85% dari target 21.73 (Sumber: Hasil Rilis BKPM RI). Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap regulasi,

birokrasi, dan insentif investasi yang ada, serta perbaikan strategi untuk menarik lebih banyak investor.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah tercermin dari predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meningkat dari 62.2 menjadi 65.71 dengan capaian 105.64% (Sumber: Hasil Penilaian Inspektorat Daerah) dan nilai AKIP PD yang meningkat dari 73 menjadi 75.94 dengan capaian 104.03% (Sumber: Inspektorat dan Menpan RB). Perbaikan ini menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang penting untuk menjaga kepercayaan publik dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

Di sisi lain, kualitas pelayanan publik menunjukkan penurunan yang perlu segera diatasi. Indeks kepuasan pelayanan publik turun dari 3.25 menjadi 2.83 dengan capaian 87.08% (Sumber: Kemenpan RB), serta nilai pelayanan publik PTSP turun dari 87 menjadi 69.71 dengan capaian 80.13% (Sumber: Ombudsman RI). Penurunan ini mencerminkan adanya masalah dalam proses pelayanan, efisiensi, atau kemampuan staf yang memerlukan evaluasi dan peningkatan melalui pelatihan staf, peningkatan teknologi informasi, dan evaluasi proses pelayanan untuk memastikan kepuasan masyarakat tetap terjaga.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 sampai dengan 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Pertumbuhan Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	6,06	0,64	2,86	12,60	2,09	16,58
1.2.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	27,93	20,19	14,36	21.73	11.05	50,85
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	66.57	65.90	65.94	62.20	65.71	105,64
1.3.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	76.57	75.90	75.94	73.00	75.94	104,03
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	87,00	87,20	87,32	3.25	2.83	87,08
1.3.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik PTSP	Nilai Pelayanan Publik PTSP	94,32	76,09	71,01	88,00	69,71	79,21

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Pertumbuhan Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2,09	12,60	16,58
1.2.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	11.05	21.73	50,85
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	65.71	62.20	105,64
1.3.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	75.94	73.00	104,03
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	2.83	3.25	87,08

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.3.2. 1	Meningkatnya kualitas pelayanan PTSP	Nilai Pelayanan Publik PTSP	69,71	88,00	79,21

Sumber : Olah Data LKPJ DPMPTSP 2024

Uraian penjelasan tabel :

Investasi di Sulawesi Tenggara menunjukkan tren positif yang signifikan selama tahun 2023, di mana pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai 5.56, mendekati setengah dari target akhir rencana strategis sebesar 12.6. Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai 11.05, menunjukkan kemajuan setengah dari target akhir 21.73. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Meskipun demikian, ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut guna mencapai target akhir yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam hal akuntabilitas dan transparansi, kinerja pemerintahan daerah di Sulawesi Tenggara menunjukkan hasil yang mengesankan pada tahun 2023. Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencapai 75.94, jauh melebihi target akhir 62.2, dengan tingkat kemajuan sebesar 122.09%. Selain itu, nilai AKIP perangkat daerah juga menunjukkan peningkatan dengan mencapai 75.94, melampaui target akhir 73 dengan tingkat kemajuan sebesar 104.03%. Hasil ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan kredibel.

Kualitas pelayanan publik di Sulawesi Tenggara juga mengalami peningkatan yang signifikan, dengan indeks kepuasan pelayanan

publik mencapai 89.48, melebihi target akhir 87 dengan tingkat kemajuan sebesar 102.85%. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga menunjukkan hasil yang positif, dengan nilai pelayanan publik dan indeks pelayanan PTSP masing-masing mencapai 89.48, melampaui target akhir 87 dan tingkat kemajuan sebesar 102.85%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah telah memberikan hasil yang nyata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.2. 1	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Pertumbuhan Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2,09	12,60	16,58
1.2. 1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	11.05	21.73	50,85

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	65.71	62.20	105,64
1.3.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	75.94	73.00	104,03
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	2.83	3.25	87,08
1.3.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PTSP	Nilai Pelayanan Publik PTSP	69,71	88,00	79,21

Sumber : Olah Data LKPJ DPMPTSP 2024

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Pertumbuhan Investasi/ Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	12.60	2,09	16,58	Persentase capaian hanya mencapai 16,58%, dengan realisasi hanya mencapai 2,09 jauh di bawah target nasional/provinsi. Hal ini mengindikasikan kurangnya efektivitas dalam kebijakan atau faktor eksternal yang menghambat realisasi investasi.	Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi terkait investasi. Serta mengidentifikasi hambatan utama dan mencari solusi yang spesifik.
1.2.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	21.73	11.05	50,85	Capaian sebesar 50.85% dari target 21.73% juga mencerminkan kegagalan dalam menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Kendala yang dihadapi kemungkinan serupa dengan yang dialami dalam pertumbuhan investasi/PMTB.	Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan peningkatan insentif bagi investor, seperti pengurangan pajak, pemberian subsidi, atau insentif non-finansial lainnya yang dapat menarik minat investor.
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	62.2	65.71	105,64	Capaian sebesar 105.64% dari target 62.2% menunjukkan keberhasilan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik.	Program yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Pemantauan berkala dan pelaporan transparan juga harus dipertahankan.
1.3.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	73,00	75.94	104,03	Capaian sebesar 104.03% dari target 73% juga menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah, yang penting untuk	Perangkat daerah perlu terus diberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.	mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
1.3. 2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	3.25	2.83	87,08	Capaian sebesar 87.08% dari target 3.25 menunjukkan penurunan kepuasan pelayanan publik, meskipun masih dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam proses pelayanan, efisiensi, atau kemampuan staf yang perlu diperbaiki.	Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelayanan publik untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Efisiensi pelayanan harus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pelatihan staf.
1.3. 2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PTSP	Nilai Pelayanan Publik PTSP	88,00	69.71	79,21	Capaian sebesar 79,21% dari target 88,00 menunjukkan penurunan kualitas pelayanan PTSP, mencerminkan tantangan dalam menyediakan pelayanan yang efisien dan memuaskan.	Investasi dalam teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Penggunaan sistem manajemen pelayanan yang lebih canggih dapat mempercepat proses dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Sumber : Sumber : Realisasi Kinerja DPMPTSP 2024

Uraian penjelasan tabel :

Penurunan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN serta pertumbuhan investasi/PMTB menunjukkan adanya kendala signifikan dalam menarik investasi. Pertumbuhan investasi/PMTB hanya mencapai 44.13% dari target 12.6% (Sumber: BPS), sementara nilai realisasi investasi PMA dan PMDN hanya mencapai 50.85% dari target

21.73 (Sumber: Hasil Rilis BKPM RI). Ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap regulasi, prosedur birokrasi, dan insentif investasi yang ada. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan simplifikasi regulasi dan peningkatan insentif untuk menarik lebih banyak investor.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah tercermin dari predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meningkat dari 62.2 menjadi 65.71 dengan capaian 105.64% (Sumber: Hasil Penilaian Inspektorat Daerah) dan nilai AKIP PD yang meningkat dari 73 menjadi 75.94 dengan capaian 104.03% (Sumber: Inspektorat dan Menpan RB). Keberhasilan ini menunjukkan upaya peningkatan kinerja dan kepercayaan publik yang efektif. Langkah-langkah yang sudah diambil perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga pengelolaan pemerintahan yang baik dan transparan.

Meskipun indeks kepuasan pelayanan publik mengalami peningkatan, nilai pelayanan publik PTSP menunjukkan penurunan. Indeks kepuasan pelayanan publik meningkat dengan capaian 87.08% dari target 3.25 (Sumber: Kemenpan RB), namun nilai pelayanan publik PTSP menurun dengan capaian 80.13% dari target 87 (Sumber: Ombudsman RI). Penurunan ini mencerminkan adanya masalah dalam proses pelayanan, efisiensi, atau kemampuan staf yang perlu segera dievaluasi. Pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui pelatihan staf, peningkatan teknologi informasi, dan evaluasi proses pelayanan untuk memastikan kepuasan masyarakat tetap terjaga.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisien si
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	12.60	2,09	16,58	3.524.211.200	3.056.164.861	86,72	Efisien
1.2.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	21.73	11.05	50,85	3.524.211.200	3.056.164.861	86,72	Efisien
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	62.2	75.94	122,09	9.652.931.352	8.960.829.696	92,83	Efisien
1.3.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah OPD	73,00	75.94	104,03	9.652.931.352	8.960.829.696	92,83	Efisien
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3.25	2.83	87,08	822.987.600	790.833.110	96,09	Efisien
1.3.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PTSP	88,00	69.71	79,21	822.987.600	790.833.110	96,09	Efisien

Sumber : Realisasi Anggaran dan Kinerja DPMPSTSP 2024

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi dengan target capaian 12,60, namun realisasi hanya 2,09 (16,58% capaian). Dari anggaran Rp 3.524.211.200, telah digunakan Rp 3.056.164.861 (86,72%), menunjukkan efisiensi

pengelolaan dana. Namun, rendahnya capaian mengindikasikan hambatan implementasi. Solusi mencakup evaluasi strategi, penguatan kerja sama antar-stakeholder, dan pemantauan berkala untuk memastikan target lebih optimal ke depannya.

Sedangkan untuk target nilai realisasi investasi dalam Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN adalah 21.73, namun realisasi hanya mencapai 11.05, dengan capaian 50.85%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3.524.211.200, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.056.164.861, dan efisiensi anggaran sebesar 86.72%. Kegagalan dalam mencapai target ini menunjukkan adanya kendala dalam menarik investasi PMA dan PMDN. Solusi yang dilakukan adalah evaluasi strategi promosi investasi dan peningkatan insentif bagi investor.

Sementara itu target predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah 62.2, namun realisasinya mencapai 75.94, dengan capaian 122.09%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 9.652.931.352, dan realisasi anggarannya adalah Rp 8.960.829.696, dengan efisiensi anggaran sebesar 92.83%. Keberhasilan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam akuntabilitas dan transparansi. Solusi yang dilakukan adalah mempertahankan dan meningkatkan program-program yang berhasil meningkatkan akuntabilitas.

Selain itu Target nilai AKIP PD adalah 73, namun realisasinya mencapai 75.94, dengan capaian 104.03%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 9.652.931.352, dan realisasi anggarannya adalah Rp 8.960.829.696, dengan efisiensi anggaran sebesar 92.83%. Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan kinerja perangkat daerah. Solusi yang dilakukan adalah melanjutkan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya dari segi target indeks kepuasan pelayanan publik adalah 3.25, namun realisasinya hanya mencapai 2.83, dengan capaian 87.08%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 822.987.600, dan realisasi anggarannya adalah Rp 790.833.110, dengan efisiensi anggaran sebesar 96.09%. Penurunan ini menunjukkan adanya masalah dalam proses pelayanan publik. Solusi yang dilakukan adalah evaluasi dan peningkatan efisiensi serta pelatihan staf.

Dan untuk target nilai pelayanan publik PTSP adalah 88,00, dengan realisasinya hanya mencapai 69.71, dengan capaian 97,21%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 822.987.600, dan realisasi anggarannya adalah Rp 790.833.110, dengan efisiensi anggaran sebesar 96.09%. Penurunan ini menunjukkan penurunan kualitas pelayanan PTSP. Solusi yang dilakukan adalah evaluasi proses pelayanan dan peningkatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Cap aian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Cap aian %	Menun jang/ Tidak Menun jang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.1	Meningka tnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Pertumbuha n Investasi/Pe mbentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	16, 58	PROGRAM PENGEMB ANGAN IKLIM PENANAM AN MODAL	Jumlah Pertumbuhan Investasi/Pembe ntukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	16,5 8	Tidak Menu njang	Penurunan investasi menunjukkan program ini tidak berhasil dalam menarik investor baru.
1.2.1.1 .1	Meningka tnya kualitas iklim	Nilai realisasi investasi	50, 85	PROGRAM PENGEMB ANGAN IKLIM	Jumlah investor yang mendapatkan insentif investasi	50,8 5	Tidak Menu njang	Penurunan investasi menunjukk an program ini

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	usaha dan investasi PMA dan PMDN	PMA dan PMDN		PENANAMAN MODAL				tidak berhasil dalam menarik investor baru.
1.2.1.1 .1.5	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang mendapatkan insentif investasi	0,00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas / Insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	0,00	Tidak Menunjang	Kurangnya fasilitas dan insentif yang diberikan menghambat minat investor
1.2.1.1 .1.5.1				Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal		Tidak Menunjang	Penetapan kebijakan tidak cukup menarik minat investor baru.
1.2.1.1 .1.5.2				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0,00	Tidak Menunjang	Evaluasi menunjukkan minimnya pelaku usaha yang memperoleh insentif.
1.2.1.1 .1.6				Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Potensi Investasi unggulan Provinsi Sultra yang Dipetakan	100,00	Menunjang	Pemetaan potensi investasi menunjukkan adanya wilayah-wilayah yang potensial untuk investasi.
1.2.1.1 .1.6.1				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	0,00	Tidak Menunjang	Kurangnya regulasi yang disusun menghambat proses investasi.
1.2.1.1 .1.6.2				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	200,00	Menunjang	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha menunjukkan adanya kesempatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								baru untuk investor.
1.2.1.1.2	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	50,85	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Media Publikasi Promosi Penanaman Modal	350,00	Menjunjung	Banyaknya media publikasi promosi menunjukkan adanya upaya untuk menarik investor baru.
1.2.1.1.2.1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Media Publikasi Promosi Penanaman Modal	350,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	275,00	Menjunjung	Banyaknya kegiatan promosi menunjukkan adanya upaya untuk menarik investor baru
1.2.1.1.2.1.1				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi		Menujang	Strategi Promosi yang baik investor baru
1.2.1.1.2.1.2				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	300,00	Menujang	Banyaknya dokumen hasil promosi menunjukkan adanya minat dari investor baru
1.2.1.1.3	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	50,85	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	50,86	Tidak Menujang	Realisasi investasi yang rendah menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan
1.2.1.1.3.2	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	50,86	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN	50,86	Tidak Menujang	Pengendalian yang efektif menghambat realisasi investasi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.1.1 .3.2.1				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	216,67	Menunjang	Koordinasi dan sinkronisasi yang baik dapat membantu meningkatkan realisasi investasi.
1.2.1.1 .3.2.2				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	107,14	Menunjang	Pembinaan pelaku usaha yang efektif meningkatkan kualitas dan keberhasilan usaha penanaman modal
1.2.1.1 .3.2.3				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	95,24	Menunjang	Pengawasan yang baik mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dan standar penanaman modal.
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	105,64	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan daerah	Peningkatan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	105,64	Menunjang	Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
1.3.1.1 .1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	104,03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100,00	Menunjang	Akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang baik meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
1.3.1.1 .1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja yang Disusun	100,00	Menunjang	Penyusunan dokumen perencanaan yang lengkap dan akurat mendukung pelaksanaan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROVINS I							program dan kegiatan yang efektif.
1.3.1.1 .1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200,00	Menunjang	Penyusunan dokumen yang baik mendukung perencanaan yang lebih terstruktur dan terarah.
1.3.1.1 .1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00	Menunjang	Koordinasi yang baik dalam penyusunan RKA-SKPD memastikan anggaran yang lebih efektif dan efisien.
1.3.1.1 .1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Menunjang	Koordinasi yang baik dalam penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD memastikan adaptasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
1.3.1.1 .1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	142,86	Menunjang	Laporan capaian kinerja yang komprehensif membantu evaluasi dan perbaikan kinerja SKPD secara berkelanjutan.
1.3.1.1 .1.1.5				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	Tidak Menunjang	Tidak adanya laporan evaluasi kinerja menunjukkan kurangnya upaya dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja.
1.3.1.1 .1.2				Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	100,00	Menunjang	Administrasi keuangan yang baik mendukung

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah.
1.3.1.1 .1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81,67	Menunjang	Penyediaan gaji dan tunjangan yang tepat waktu dan sesuai meningkatkan kesejahteraan dan motivasi ASN.
1.3.1.1 .1.2.2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	Menunjang	Administrasi pelaksanaan tugas yang baik mendukung kelancaran operasional ASN.
1.3.1.1 .1.2.3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	400,00	Menunjang	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang baik mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD
1.3.1.1 .1.2.4				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan		Menunjang	Target terpenuhi sebagian
1.3.1.1 .1.2.5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	200,00	Tidak Menunjang	Belum ada realisasi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.1.1 .1.2.6				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	Menunjang	Proses berjalan baik
1.3.1.1 .1.3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	166,67	Menunjang	Target tercapai
1.3.1.1 .1.3.1				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500,00	Tidak Menunjang	Belum ada laporan
1.3.1.1 .1.3.2				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	Tidak Menunjang	Belum ada dokumen
1.3.1.1 .1.3.3				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0,00	Menunjang	Laporan berjalan baik
1.3.1.1 .1.4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	Menunjang	Target tercapai
1.3.1.1 .1.4.1				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.250,00	Menunjang	Proses berjalan
1.3.1.1 .1.4.2				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Tidak Menunjang	Belum ada koordinasi
1.3.1.1 .1.4.3				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00	Tidak Menunjang	Belum ada evaluasi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.1.1 .1.4.4				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	Menunjang	Pendidikan berjalan
1.3.1.1 .1.4.5				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20,00	Tidak Menunjang	Belum ada sosialisasi
1.3.1.1 .1.4.6				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0,00	Tidak Menunjang	Belum ada bimbingan
1.3.1.1 .1.4.7				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0,00	Menunjang	Administrasi berjalan baik
1.3.1.1 .1.5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	306,62	Tidak Menunjang	Belum ada penyediaan
1.3.1.1 .1.5.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0,00	Tidak Menunjang	Belum ada penyediaan
1.3.1.1 .1.5.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	Menunjang	Penyediaan berjalan baik
1.3.1.1 .1.5.3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	250,00	Menunjang	Target tercapai
1.3.1.1 .1.5.4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1.250,00	Menunjang	Target terpenuhi sebagian

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.1.1 .1.5.5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	500,00	Menunjang	Penyediaan Berjalan Lancar
1.3.1.1 .1.5.6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan - dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60,00	Menunjang	Bahan bacaan tersedia
1.3.1.1 .1.5.7				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	0,00	Tidak Menunjang	Belum ada realisasi penyediaan
1.3.1.1 .1.5.8				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	500,00	Menunjang	Kunjungan tamu berjalan lancar
1.3.1.1 .1.5.9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.120,00	Menunjang	Rapat koordinasi berjalan baik
1.3.1.1 .1.5.10				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	Tidak Menunjang	Arsip dinamis belum tertata
1.3.1.1 .1.5.11				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	Tidak Menunjang	Dukungan belum tersedia
1.3.1.1 .1.6				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	185,00	Menunjang	Pengadaan berjalan baik
1.3.1.1 .1.6.1				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100,00	Menunjang	Pengadaan kendaraan berjalan lancar

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.1.1 .1.6.2				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	100,00	Menunjang	Pengadaan mebel berjalan baik
1.3.1.1 .1.6.3				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	300,00	Menunjang	Pengadaan mesin berjalan baik
1.3.1.1 .1.6.4				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0,00	Tidak Menunjang	Belum ada pengadaan aset tetap lainnya
1.3.1.1 .1.6.5				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	Tidak Menunjang	Belum ada pengadaan sarana dan prasarana lainnya
1.3.1.1 .1.6.6				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	800,00	Menunjang	Pengadaan berjalan baik
1.3.1.1 .1.7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan	120,83	Menunjang	Laporan berjalan baik
1.3.1.1 .1.7.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	250,00	Menunjang	Penyediaan jasa berjalan lancar
1.3.1.1 .1.7.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	241,67	Menunjang	Penyediaan jasa berjalan lancar
1.3.1.1 .1.7.3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	Tidak Menunjang	Belum ada penyediaan jasa
1.3.1.1 .1.7.4				Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	600,00	Menunjang	Penyediaan berjalan lancar

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Umum Kantor	kantor yang dise diakan			
1.3.1.1 .1.8				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	102,13	Menunjang	Pemeliharaan berjalan baik
1.3.1.1 .1.8.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00	Menunjang	Pemeliharaan berjalan lancar
1.3.1.1 .1.8.2				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	0,00	Tidak Menunjang	Belum ada pemeliharaan mebel
1.3.1.1 .1.8.3				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160,00	Menunjang	Pemeliharaan berjalan baik
1.3.1.1 .1.8.4				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pelihara/Rehabilitasi	300,00	Menunjang	Pemeliharaan berjalan baik
1.3.1.1 .1.8.5				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	133,33	Menunjang	Pemeliharaan berjalan baik
1.3.1.1 .1.8.6				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang dilaksanakan	133,33	Menunjang	Pemeliharaan berjalan baik

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Bangunan Lainnya				
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	87,08				Menunjang	Pelayanan publik berjalan sesuai target
1.3.2.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan PTSP	Nilai Pelayanan Publik PTSP	80,13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Atas Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	106,52	Menunjang	Survey kepuasan menunjukkan hasil baik
1.3.2.1.1.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Atas Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	106,52	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Perizinan dan Non Perizinan yang Disusun	106,52	Menunjang	Survey kepuasan menunjukkan hasil baik
1.3.2.1.1.1.1				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.090,00	Menunjang	Penyediaan pelayanan berjalan baik
1.3.2.1.1.1.2				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	5.000,00	Menunjang	Pemantauan berjalan sesuai target
1.3.2.1.1.1.3				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/I	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	0,00	Tidak Menunjang	Belum ada pelaku usaha yang melakukan koordinasi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Insentif Daerah	Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota			
1.3.2.1 .1.2				Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin Kewenangan Daerah Provinsi yang Diterbitkan	109,00	Menunjang	Izin diterbitkan sesuai target
1.3.2.1 .1.2.1				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	0,00	Tidak Menunjang	Belum ada pelaku usaha yang difasilitasi
1.3.2.1 .1.2.3				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	0,00	Tidak Menunjang	Belum ada kegiatan sinkronisasi
1.3.2.1 .1.2.4				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terhadap Terkait Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Kewenangan Daerah Provinsi	6.140,00	Menunjang	Layanan konsultasi berjalan baik

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Tahun 2025

Berikut adalah penjelasan dalam bentuk paragraf dari tabel-tabel di atas:

Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi, dengan indikator kinerja mencapai 12,6. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3.524.211.200 dan realisasi mencapai Rp 3.056.164.861, dengan persentase capaian 86,72%. Analisis menunjukkan bahwa anggaran mencukupi dan realisasi berjalan dengan baik.

Selain itu, berbagai pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya juga dilakukan. Sebanyak 300 gedung kantor dan bangunan lainnya ditargetkan untuk dipelihara atau direhabilitasi, dengan hasil yang menunjang karena proses pemeliharaan berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana gedung kantor serta bangunan lainnya juga dipelihara dan direhabilitasi dengan target sebanyak 133,33 unit dan proses ini berjalan dengan baik.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, ditetapkan indikator kinerja berupa Indeks Kepuasan Pelayanan Publik dengan target 87,08. Proses pelayanan publik ini berjalan sesuai target dan menunjang peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga menunjukkan hasil yang baik, dengan nilai pelayanan publik mencapai 80,13 dan survey kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan mencapai 106,52. Program pelayanan penanaman modal juga berjalan dengan baik, menunjukkan hasil survey kepuasan masyarakat yang positif.

Di sisi lain, upaya penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berjalan dengan baik. Sebanyak 1.090 pelaku usaha mendapatkan pelayanan terpadu ini. Selain itu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal juga dilakukan dengan target 5.000 kegiatan usaha dari pelaku usaha yang dipantau. Pemantauan ini berjalan sesuai target.

Namun, terdapat beberapa kegiatan yang belum menunjang, seperti koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas atau insentif daerah, di mana belum ada pelaku usaha yang melakukan koordinasi ini. Begitu pula dengan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi, di mana jumlah izin kewenangan daerah provinsi yang diterbitkan sesuai target, tetapi pelaku usaha yang difasilitasi pelayanan terpadu perizinan masih belum ada.

Terakhir, layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berjalan baik, dengan jumlah orang yang mendapatkan layanan ini mencapai 6.140. Secara keseluruhan, sebagian besar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan menunjang tujuan yang ingin dicapai.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 1.1. 1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	302.275.300	290.418.050	96,08
1.2. 1.1. 1.5	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0	0	0

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 1.1. 1.5. 1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	0
1.2. 1.1. 1.5. 2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	0
1.2. 1.1. 1.6	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	302.275.300	290.418.050	96,08
1.2. 1.1. 1.6. 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	52.275.300	47.375.000	90,63
1.2. 1.1. 1.6. 2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	250.000.000	243.043.050	97,22
1.2. 1.1. 2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.364.162.000	1.357.857.867	99,54
1.2. 1.1. 2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.364.162.000	1.357.857.867	99,54
1.2. 1.1. 2.1. 1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.230.082.000	1.223.777.867	99,49

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 1.1. 2.1. 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	134.080.000	134.080.000	100,00
1.2. 1.1. 3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.857.773.900	1.407.888.944	75,78
1.2. 1.1. 3.2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.857.773.900	1.407.888.944	75,78
1.2. 1.1. 3.2. 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0
1.2. 1.1. 3.2. 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.423.411.900	1.173.080.944	82,41
1.2. 1.1. 3.2. 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	434.362.000	234.808.000	54,06
1.3. 1.1. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.652.931.352	8.960.829.696	92,83

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3. 1.1. 1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.771.830	200.365.866	93,29
1.3. 1.1. 1.1. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.350.800	105.102.640	99,76
1.3. 1.1. 1.1. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	58.907.130	57.226.930	97,15
1.3. 1.1. 1.1. 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.299.900	25.050.296	95,25
1.3. 1.1. 1.1. 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.214.000	12.986.000	53,63
1.3. 1.1. 1.1. 5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
1.3. 1.1. 1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.161.700.622	5.834.343.800	94,69
1.3. 1.1. 1.2. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.908.017.072	5.583.405.750	94,51
1.3. 1.1.	Penyediaan Administrasi	202.080.000	202.080.000	100,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 2	Pelaksanaan Tugas ASN			
1.3. 1.1. 1.2. 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.350.000	6.050.000	72,46
1.3. 1.1. 1.2. 4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0
1.3. 1.1. 1.2. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD	43.253.550	42.808.050	98,97
1.3. 1.1. 1.2. 6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0
1.3. 1.1. 1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.300.000	3.140.000	43,01
1.3. 1.1. 1.3. 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.300.000	3.140.000	43,01
1.3. 1.1. 1.3. 2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0
1.3. 1.1. 1.3. 3	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3. 1.1. 1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	363.332.500	362.922.690	99,89
1.3. 1.1. 1.4. 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	320.600.000	320.600.000	100,00
1.3. 1.1. 1.4. 2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0
1.3. 1.1. 1.4. 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	0
1.3. 1.1. 1.4. 4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0
1.3. 1.1. 1.4. 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.732.500	42.322.690	99,04
1.3. 1.1. 1.4. 6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
1.3. 1.1. 1.4. 7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0	0
1.3. 1.1. 1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.361.805	369.705.445	96,94

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3. 1.1. 1.5. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.497.250		0,00
1.3. 1.1. 1.5. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
1.3. 1.1. 1.5. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.200.000	4.200.000	100,00
1.3. 1.1. 1.5. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.929.555	16.455.000	97,20
1.3. 1.1. 1.5. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.883.300	8.258.500	64,10
1.3. 1.1. 1.5. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.440.000	1.200.000	83,33
1.3. 1.1. 1.5. 7	Penyediaan Bahan/Material	0	0	0
1.3. 1.1. 1.5. 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.300.000	43.157.000	97,42
1.3. 1.1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.111.700	296.434.945	99,44

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.5. 9				
1.3. 1.1. 1.5. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0
1.3. 1.1. 1.5. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0
1.3. 1.1. 1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	697.097.980	510.682.506	73,26
1.3. 1.1. 1.6. 1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.300.000	45.300.000	100,00
1.3. 1.1. 1.6. 2	Pengadaan Mebel	20.175.000	19.900.000	98,64
1.3. 1.1. 1.6. 3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.500.000	166.000.000	89,01
1.3. 1.1. 1.6. 4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
1.3. 1.1. 1.6. 5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3. 1.1. 1.6. 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	445.122.980	279.482.506	62,79
1.3. 1.1. 1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	891.791.620	885.631.262	99,31
1.3. 1.1. 1.7. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.275.000	3.050.000	93,13
1.3. 1.1. 1.7. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.735.270	394.490.462	98,94
1.3. 1.1. 1.7. 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
1.3. 1.1. 1.7. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	489.781.350	488.090.800	99,65
1.3. 1.1. 1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.574.995	794.038.127	84,87
1.3. 1.1. 1.8. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.869.200	58.333.826	53,09

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3. 1.1. 1.8. 2	Pemeliharaan Mebel	0	0	0
1.3. 1.1. 1.8. 3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.305.000	18.800.000	97,38
1.3. 1.1. 1.8. 4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	536.648.800	458.617.500	85,46
1.3. 1.1. 1.8. 5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
1.3. 1.1. 1.8. 6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	269.751.995	258.286.801	95,75
1.3. 2.1. 1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	822.987.600	790.833.110	96,09
1.3. 2.1. 1.1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	381.875.200	367.151.583	96,14
1.3. 2.1. 1.1. 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	146.955.800	132.391.178	90,09

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terintegrasi Secara Elektronik			
1.3. 2.1. 1.1. 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	234.919.400	234.760.405	99,93
1.3. 2.1. 1.1. 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0	0	0
1.3. 2.1. 1.2	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	441.112.400	423.681.527	96,05
1.3. 2.1. 1.2. 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0
1.3. 2.1. 1.2. 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0	0	0
1.3. 2.1. 1.2. 4	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	441.112.400	423.681.527	96,05

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			

Sumber : Data Realisasi Keuangan DPMPSTSP Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel:

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp302.275.300 dan telah direalisasikan sebesar Rp290.418.050, mencapai 96,08%. Beberapa kegiatan dalam program ini termasuk pembuatan peta potensi investasi provinsi dengan anggaran Rp302.275.300 dan realisasi Rp290.418.050 (96,08%), serta penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi yang memiliki anggaran Rp52.275.300 dan realisasi Rp47.375.000 (90,63%).

Program Promosi Penanaman Modal fokus pada kegiatan promosi untuk menarik investasi ke daerah. Program ini memiliki anggaran Rp1.364.162.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.357.857.867, dengan capaian sebesar 99,54%. Kegiatan dalam program ini meliputi penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi dengan anggaran Rp1.230.082.000 dan realisasi Rp1.223.777.867 (99,49%), serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi dengan anggaran Rp134.080.000 dan realisasi sebesar Rp134.080.000 (100,00%).

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal di daerah. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp1.857.773.900 dan realisasi Rp1.407.888.944, dengan capaian sebesar 75,78%. Beberapa kegiatan dalam program ini termasuk pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi dengan anggaran

Rp1.857.773.900 dan realisasi Rp1.407.888.944 (75,78%), serta koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dengan anggaran Rp1.423.411.900 dan realisasi Rp1.173.080.944 (82,41%).

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mencakup berbagai kegiatan pendukung administrasi pemerintah daerah. Program ini memiliki anggaran Rp9.652.931.352 dan realisasi Rp8.960.829.696, dengan capaian sebesar 92,83%. Kegiatan-kegiatan dalam program ini termasuk perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran Rp214.771.830 dan realisasi Rp200.365.866 (93,29%), serta administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran Rp6.161.700.622 dan realisasi Rp5.834.343.800 (94,69%).

Program Pelayanan Penanaman Modal menyediakan layanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp822.987.600 dan realisasi sebesar Rp790.833.110, dengan capaian sebesar 96,09%. Kegiatan dalam program ini termasuk penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan anggaran Rp441.112.400 dan realisasi Rp423.681.527 (96,05%).

Program-program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi dan penanaman modal melalui berbagai inisiatif dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Data anggaran, realisasi, dan persentase capaian memberikan gambaran tentang efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan dari masing-masing program.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 3 sasaran strategis dengan 1 sasaran strategis tercapai dan 2 sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah
 - a. Kurangnya jumlah investor nasional dan nilai investasi yang terbatas menjadi hambatan utama dalam meningkatkan realisasi investasi. Selain itu, keterbatasan daya serap tenaga kerja juga

mempengaruhi kemampuan DPMPTSP untuk menarik lebih banyak investasi.

- b. Nilai investasi yang masuk ke Provinsi Sulawesi Tenggara relatif kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Keterbatasan ini menyebabkan daya dorong ekonomi yang dihasilkan juga kurang maksimal.
- c. Kondisi Iklim Investasi, walaupun ada kebijakan yang mempermudah proses perizinan, iklim investasi di Sulawesi Tenggara masih dianggap kurang kondusif oleh investor. Beberapa faktor seperti birokrasi yang kompleks dan ketidakpastian regulasi masih menjadi tantangan yang harus diatasi.
- d. Keterbatasan Infrastruktur yang kurang memadai menjadi hambatan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Keterbatasan ini mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta infrastruktur digital yang diperlukan untuk mendukung sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik.
- e. Keterbatasan Daya Serap Tenaga Kerja, daya serap tenaga kerja yang rendah juga mempengaruhi kemampuan daerah untuk menarik investasi. Investor cenderung memilih lokasi yang memiliki tenaga kerja yang terlatih dan siap pakai. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan menjadi sangat penting.
- f. Pelaksanaan Program yang Tidak Optimal, Sebagian besar program memiliki anggaran yang besar tetapi realisasi yang rendah, seperti yang terlihat pada tabel sebelumnya. Misalnya, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran Rp1.857.773.900 hanya mencapai realisasi Rp1.407.888.944 (75,78%). Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan program yang mungkin

disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang kurang efektif, atau hambatan lainnya.

- g. Koordinasi dan Sinkronisasi yang Kurang Efektif, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi sering kali kurang efektif, seperti yang terlihat pada beberapa sub-kegiatan yang tidak memiliki data anggaran dan realisasi. Misalnya, Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tidak memiliki data anggaran dan realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kendala dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.
- h. Sistem Pelayanan yang Masih Perlu Ditingkatkan, meskipun sudah ada sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik, implementasinya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, misalnya, memiliki anggaran Rp441.112.400 dan realisasi Rp423.681.527 (96,05%), yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal pelayanan.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan meningkatkan realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Daya Tarik Investasi

- Promosi Investasi yang Lebih Agresif: Mengadakan pameran, seminar, dan roadshow untuk menarik investor baik domestik maupun internasional.
- Penyediaan Informasi yang Transparan: Menyediakan data yang komprehensif dan terkini mengenai potensi investasi di Sulawesi Tenggara melalui berbagai platform.

2. Penyederhanaan Proses Perizinan

- Optimalisasi Sistem OSS: Memastikan sistem Online Single Submission (OSS) berfungsi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh para investor.
- Pelatihan dan Sosialisasi: Mengadakan pelatihan bagi pegawai dan sosialisasi bagi masyarakat mengenai tata cara penggunaan sistem perizinan berbasis elektronik.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- Pelatihan dan Pendidikan: Menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal agar siap bekerja di sektor-sektor yang diinvestasikan.
- Kerjasama dengan Perguruan Tinggi: Bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri.

4. Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan

- Evaluasi Regulasi: Melakukan evaluasi dan penyesuaian regulasi yang menghambat investasi, serta memastikan adanya kepastian hukum bagi investor.
- Pemberian Insentif: Mengkaji dan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal yang menarik bagi investor, seperti pembebasan pajak dan kemudahan akses lahan.

5. Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Lembaga

- Pembentukan Tim Koordinasi: Membentuk tim koordinasi antar lembaga untuk memastikan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

- Rapat Koordinasi Rutin: Mengadakan rapat koordinasi rutin untuk membahas perkembangan, hambatan, dan solusi yang dapat diambil.

6. Monitoring dan Evaluasi

- Penyusunan Indikator Kinerja: Menyusun indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk memantau kemajuan setiap program dan kegiatan.
- Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.

7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Kendari, 14 Februari 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PARINRINGI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

NIP. 19771014 200312 1 007

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Parinringi, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Komjen Pol. Purn Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K.,M.H

Jabatan : Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.,M.H

PIHAK PERTAMA

Parinringi, SE, M.Si

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	37 Perusahaan
	Jumlah Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Rp. 34,73 Triliun
	Jumlah Izin yang Diterbitkan	500 Izin
	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	4 Media
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
	Lama Maksimal Waktu Pelayanan	1 hari
	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	A (-)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	356,567,300,-
2.	Program Promosi Penanaman Modal	943,100,000,-
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	850,701,000,-
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1,836,317,700,-
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8,793,795,358,-
Jumlah		12.939.653.358,-

Kendari, 2 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.,M.H.

KEPALA DINAS,
DPMPTSP,

Parinngi, SE, M.Si

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun n (Jika Ada)

Dilampirkan Scan Perubahan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Parinringi, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Komjen Pol. Purn Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K.,M.H

Jabatan : Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian perubahan ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 7 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.,M.H.

KEPALA DINAS,
DPMPPTSP,

Parinringi, SE, M.Si

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	37 Perusahaan
	Jumlah Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Rp. 34,73 Triliun
	Jumlah Izin yang Diterbitkan	500 Izin
	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	4 Media
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
	Lama Maksimal Waktu Pelayanan	1 hari
	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	A (-)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	302.275.300,-
2.	Program Promosi Penanaman Modal	1.364.162.000,-
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	822.987.600.000,-
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.857.773.900,-
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9,652,931,352,-
Jumlah		14.000.130.152,-

Kendari, 7 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.,M.H.

KEPALA DINAS,
DPMPTSP,

Parinngi, SE, M.Si

Lampiran 3 Matriks Renstra (3 tahun)

Diisi matriks Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara selama 3 tahun

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2				PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang mendapatkan insentif investasi	4 investor	2 investor	370.000.000	2 investor	1.000.000.000	2 investor	370.000.000	2 investor	1.740.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKUM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2	1.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	500.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKUM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2	1.01	1		Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	- Dokumen	-	1 Dokumen	350.000.000	- Dokumen	-	2 Dokumen	350.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKUM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2	1,01	2		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan 4 an Usaha	2 Kegiatan Usaha	50.000.000	2 Kegiatan Usaha	50.000.000	2 Kegiatan Usaha	50.000.000	10 Kegiatan Usaha	150.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKUM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan luar daerah

Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Potensi Investasi Unggulan Provinsi Sultra yang Dipetakan	Potensi 6 Unggulan	Potensi 6 Unggulan	320.000.000	Potensi 6 Unggulan	600.000.000	Potensi 6 Unggulan	320.000.000	Potensi 5 Unggulan	1.240.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKUM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2	1.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Pengumuman	1 Peraturan	70.000.000	1 Perda	350.000.000	- Dokumen	70.000.000	1 Perda	490.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKUM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2	1.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Peta 1 potensi	1 Peta potensi	250.000.000	1 Peta potensi	250.000.000	1 Peta potensi	250.000.000	4 Peta potensi	750.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKUM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah media publikasi promosi penanaman modal	10 media	4 media	1.500.000.000	4 media	1.850.000.000	4 media	1.850.000.000	4 media	5.200.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKUM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	3	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	14 Kegiatan	4 Kegiatan	1.500.000.000	5 Kegiatan	1.850.000.000	4 Kegiatan	1.850.000.000	32 Kegiatan	5.200.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKUM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	3	1.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	# Dokumen	- Dokumen	-	1 Dokumen	350.000.000	- Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	700.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKUM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	3	1.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi Penanaman Modal Provinsi	19 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000.000	4 Dokumen	1.500.000.000	4 Dokumen	1.500.000.000	31 Dokumen	4.500.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKUM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan luar daerah

Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp. 20,19 Triliun	Rp. 21,73 Triliun	1.106.000.000	Rp. 22,5 Triliun	1.375.000.000	Rp. 23 Triliun	1.106.000.000	Rp. 23 Triliun	3.587.000.000	BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten/ Kota Se-Sultra
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	5	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp. 20,19 Triliun	Rp. 21,73 Triliun	1.106.000.000	Rp. 21,73 Triliun	1.375.000.000	Rp. 21,73 Triliun	1.106.000.000	Rp. 21,73 Triliun	3.587.000.000	BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten/ Kota Se-Sultra
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	5	1.01	2	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pembinaan Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal	908 orang	700 orang	665.000.000	950 orang	902.500.000	700 orang	665.000.000	3258 orang	2.232.500.000	BIDANG PENGENDALIAN	Kabupaten/ Kota Se-Sultra
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	5	1.01	3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	42 Proyek	42 Proyek	441.000.000	45 Proyek	472.500.000	42 Proyek	441.000.000	171 Proyek	1.354.500.000	BIDANG PENGENDALIAN	Kabupaten/ Kota Se-Sultra
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 PERSEN	100 PERSEN	12.443.000.000	100 PERSEN	13.428.000.000	100 PERSEN	14.343.000.000	100 PERSEN	64.745.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja yang Disusun	34 Dokumen	13 Dokumen	355.000.000	13 Dokumen	355.000.000	13 Dokumen	355.000.000	85 Dokumen	1.065.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	16 Dokumen	450.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	14 Dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	11 Dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	7 Laporan	50.000.000	7 Laporan	50.000.000	7 Laporan	50.000.000	37 Laporan	150.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	7 Dokumen	165.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	108 Dokumen	27 Dokumen	6.285.000.000	27 Dokumen	6.785.000.000	27 Dokumen	7.285.000.000	189 Dokumen	20.355.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53,00 orang	60 orang	6.000.000.000	65 orang	6.500.000.000	60 orang	7.000.000.000	238 orang	19.500.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48,00 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	200.000.000	84 Dokumen	600.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.02	5	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	7 Dokumen	45.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	48 Laporan	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	84 Laporan	180.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah	12 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	45.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.03	6	Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	7 Laporan	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48 Laporan	9 Laporan	376.000.000	9 Laporan	376.000.000	9 Laporan	376.000.000	40 Laporan	663.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.05	1	Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 unit	- unit	-	- unit	-	- unit	-	1 unit	-	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11 Paket	4 Paket	216.000.000	4 Paket	216.000.000	4 Paket	216.000.000	23 Paket	648.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	190 orang	150.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	40 orang	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	190 orang	150.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40 orang	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	190 orang	150.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Laporan	122 Laporan	1.324.000.000	122 Laporan	1.324.000.000	122 Laporan	1.324.000.000	777 Laporan	3.972.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	7 Paket	150.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 unit	20 unit	500.000.000	20 unit	500.000.000	20 unit	500.000.000	100 unit	1.500.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	10 Paket	300.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20 Paket	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	26 Paket	150.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48 Paket	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	84 Paket	150.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	20 Dokumen	5.000.000	20 Dokumen	5.000.000	20 Dokumen	5.000.000	108 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	4 Paket	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	42 Laporan	12 Laporan	54.000.000	12 Laporan	54.000.000	12 Laporan	54.000.000	78 Laporan	162.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 Laporan	50 Laporan	500.000.000	50 Laporan	500.000.000	50 Laporan	500.000.000	350 Laporan	1.500.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah yang Tersedia	70 Unit	13 Unit	1.960.000.000	13 Unit	1.965.000.000	13 Unit	1.970.000.000	77 Unit	21.443.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 unit	2 unit	60.000.000	2 unit	65.000.000	2 unit	70.000.000	20 unit	195.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 Paket	3 Paket	100.000.000	3 Paket	100.000.000	3 Paket	100.000.000	16 Paket	300.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	5 unit	500.000.000	5 unit	500.000.000	5 unit	500.000.000	21 unit	1.500.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	4 unit	900.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	8 unit	1.500.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	5 unit	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	8 unit	1.500.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Ususan	48 Laporan	17 Laporan	920.000.000	17 Laporan	1.020.000.000	17 Laporan	1.120.000.000	68 Laporan	12.488.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	8 Laporan	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	14 Laporan	45.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	700.000.000	40 Laporan	1.800.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	4 Laporan	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	400.000.000	10 Laporan	1.200.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	48 Unit	40 Unit	1.228.000.000	47 Unit	1.588.000.000	54 Unit	1.898.000.000	183 Unit	4.714.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	12 unit	100.000.000	14 unit	200.000.000	16 unit	300.000.000	52 unit	600.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5 Set	1 Set	3.000.000	1 Set	3.000.000	1 Set	3.000.000	8 Set	9.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	20 unit	25.000.000	25 unit	35.000.000	30 unit	45.000.000	119 unit	105.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1,09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pelihara/ Rehabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	400.000.000	1 Gedung	500.000.000	1 Gedung	600.000.000	4 Gedung	1.500.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	4 Paket	3 Paket	300.000.000	3 Paket	400.000.000	3 Paket	450.000.000	13 Paket	1.150.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	18	1	1,09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor yang dilaksanakan	11 Paket	3 Paket	400.000.000	3 Paket	450.000.000	3 Paket	500.000.000	20 Paket	1.350.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	NILAI SURVEY/KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PEMBELANGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	83,56 Poin	84,50 Poin	710.000.000	### Poin	120.000.000	85,50 Poin	120.000.000	86 Poin	950.000.000	BIDANG PENGADUAN KEUJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	18	4	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Regulasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disusun	11 Dokumen	21 Dokumen	625.000.000	21 Dokumen	35.000.000	21 Dokumen	35.000.000	3882 Dokumen	695.000.000	BIDANG PENGADUAN KEUJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	18	4	1.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	3668 Orang	50 Orang	5.000.000	50 Orang	5.000.000	50 Orang	5.000.000	3818 Orang	15.000.000	BIDANG PEMBELANGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	18	4	1.01	2	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Pelaku Usaha	51 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	600.000.000	1 Kegiatan Usaha	10.000.000	1 Kegiatan Usaha	10.000.000	54 Kegiatan Usaha	620.000.000	BIDANG PEMBELANGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	18	4	1.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah Kabupaten/ Kota	4 orang	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	10 orang	60.000.000	BIDANG PEMBELANGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	18	4	1.02		Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin Kewenangan Daerah Provinsi yang diterbitkan	3666 izin	500 izin	85.000.000	500 izin	85.000.000	500 izin	85.000.000	5259 izin	255.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	18	4	1.02	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	3666 orang	500 orang	60.000.000	500 orang	60.000.000	500 orang	60.000.000	5166 orang	180.000.000	BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	18	4	1.02	3	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terhadap Terkait Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Kewenangan Daerah Provinsi	70 Orang	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	85 Orang	15.000.000	BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	18	4	1.02	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan 2 an usaha	2 Kegiatan n usaha	20.000.000	2 Kegiatan usaha	20.000.000	2 Kegiatan usaha	20.000.000	8 Kegiatan usaha	60.000.000	BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Lama rata-rata proses penerbitan izin pasca berkas lengkap	7 hari	3 hari	50.000.000	2 hari	70.000.000	1 hari	80.000.000	1 hari	200.000.000	BIDANG PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	Dalam dan luar daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	18	6	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	6 Dokumen	200.000.000	BIDANG PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	Dalam dan luar daerah

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	18	6	1.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilah, Ditkaji, dan Dimanfaatkan	3666 Dokumen	500 Dokumen	50.000.000	600 Dokumen	70.000.000	700 Dokumen	80.000.000	5466 Dokumen	200.000.000	BIDANG PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	Dalam dan luar daerah
Jumlah Pagu Indikatif										16.199.000.000		17.843.000.000		17.869.000.000		76.422.000.000			

Kendari, 14 Februari 2025

DINAS PERANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PARINRINGI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

NIP. 19771014 200312 1 007

Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah

Diisi Scan LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah yang diterima dari Inspektorat



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
INSPEKTORAT DAERAH
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2023**

**NOMOR: 700.1.2.7 / 198 / IRBAN II / 2024
TANGGAL 19 AGUSTUS 2024**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Bumi Praja Anduonohu - Kendari 93232

Kendari, 19 - 0 - 2024

Nomor : 700-1.2.7/198/1560n II/2024
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2023.

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara
di Kendari

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP dapat memberikan simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Nilai hasil penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Keterangan
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi kami, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **75,94** dengan kategori **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**, yang menginterpretasikan **"Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator"**.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	24,01	25,57
2	Pengukuran Kinerja	30	19,89	20,47
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00	12,40
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,90	75,94
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			"BB"	"BB"

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Intansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur



Dr. Intan Nurcahya, S.P., M.Si., CGCAE.
Pembina Tk. I, Gol IV/b
NIP. 19740128 200212 2 006

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Tenggara.

Paraf Hierarki		
Peran Penugasan	Tanggal	Paraf
Inspektur Pembantu II		
Pengendali Utama		
Pengendali Teknis		
Ketua Tim		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Evaluasi

Dasar hukum evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) oleh APIP Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor 800.1.11.1/178/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Perihal Melakukan Evaluasi SAKIP pada OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sulawesi Tenggara.

B. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu bentuk sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP;
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Pengumpulan data;
2. Wawancara;
3. Konfirmasi.

F. Gambaran Umum Evaluatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP Prov. Sultra) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPMPTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

DPMPTSP Prov. Sultra merupakan nomenklatur ketiga instansi ini. Sebelumnya pada awal pendirian sebagai organisasi tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu instansi ini bernama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Prov. Sultra. BPMD Prov. Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMMD dan PTSP) Prov. Sultra berdasarkan perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak memiliki Kepala Bidang dan Kepala Seksi sebagaimana diatur dalam aturan tersebut.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja dan telah memiliki sistem pengumpulan data kinerja yang memadai. Dari hasil penilaian tahun sebelumnya **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara** mendapatkan nilai sebesar **75,90** termasuk ke dalam kategori **BB**, yang diinterpretasikan **Baik** dalam pengelolaan kinerjanya.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Selama tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 700.1.2.1/103/Irbn II/2023 tanggal 10 April 2023. Hasil evaluasi yang sudah ditindaklanjuti tersebut adalah:

1. Rencana Aksi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target-target yang dicapai direviu secara berkala.
2. Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data atas rencana aksi dilakukan secara berkala dan dikembangkan dengan teknologi informasi.
3. Evaluasi program dan sistem monitoring dilakukan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana Aksi, dan target-target yang ingin dicapai.

Hasil evaluasi yang sudah ditindaklanjuti sebagaimana matriks berikut:

NO	REKOMENDASI INSPEKTORAT LHE TAHUN 2022	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS /PROGRES PENYELESAIAN	BUKTI DUKUNG/ EVIDENCE
1	Rencana Aksi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target-target yang dicapai direviu secara berkala	Melakukan reviu berkala terhadap Rencana Aksi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target-target yang dicapai	Seluruh Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1, 2, 3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai	Terlampir
2	Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data atas rencana aksi dilakukan secara berkala dan dikembangkan dengan teknologi informasi	Melakukan Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data atas rencana aksi secara berkala dan mengembangkan dengan teknologi informasi	Seluruh Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1, 2, 3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai	Terlampir
3	Evaluasi program dan sistem monitoring dilakukan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana Aksi, dan target-target yang ingin dicapai	Melaksanakan secara konsisten evaluasi program dan sistem monitoring untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana Aksi, dan target-target yang ingin dicapai	Seluruh Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1, 2, 3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai	Terlampir

BAB II HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Nilai evaluasi SAKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	
			Nilai	% capaian
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	25,67	85,23
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6,00	100,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	7,04	78,18
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	11,63	77,50
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	20,47	68,24
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	5,01	55,71
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	8,85	59,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,40	82,67
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,94	98,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60	80,00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	70,00

4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	17,50	70,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,50	70,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,50	60,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10,00	80,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja				75,94

Berdasarkan persentase capaian sebagaimana tertuang pada tabel di atas masih terdapat hal-hal Yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Utama belum sustainable atau belum tertuang secara berkelanjutan dalam 5 tahun;
- Pohon kinerja/*Cascading* yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis/*logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan *critical success factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan;
- Perencanaan kinerja (*Crosscutting*) belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dokumen pendukung (RENSTRA dan IKU) tidak dapat menjelaskan deskripsi dan cara mengukur indikator kinerja yang jelas yaitu memuat informasi mengenai *what* (deskripsi), *why* (penyebab adanya kinerja tersebut), *when* (target waktu), *where* (lokasi kinerja), *who* (target/sasaran kinerja), *how* (langkah-langkah kinerja), *how much* (berapa biayanya);
- Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi berupa aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan PD.
- Agar hasil pengukuran kinerja menjadi dasar atas rolling/penempatan pegawai antar bidang dan perbaikan aktivitas dalam pencapaian kinerja

yang dibuktikan dengan Nota dinas roling pegawai (bila terdapat roling pegawai), rapat-rapat, daftar hadir dan notulen rapat pembahasan perbaikan aktivitas dalam pencapaian kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Dokumen LKjIP belum dilakukan revidi oleh APIP dibuktikan dengan tidak adanya Laporan Hasil Revidi atau Surat Pernyataan Telah Direvidi;
- b) Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkala pertriwulan bukan hanya pertahun sebagai bahan revidi untuk perbaikan kedepan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum terpenuhi;
- b) Analisa secara mendalam disimpulkan belum memadai karena evaluator internal telah melakukan pengecekan validitas data dan keberadaan data, tetapi data dimaksud tidak dapat ditelusuri karena keterbatasan sumber daya perangkat daerah.

B. Rekomendasi

Untuk lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, direkomendasikan beberapa hal berikut untuk ditindaklanjuti:

1. Menyusun Indikator Kinerja Utama secara berkelanjutan dalam 5 tahun;
2. Menjamin Pohon kinerja/*Cascading* yang disusun agar seluruhnya memenuhi prinsip logis/*logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *critical success factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan
3. Menjamin Perencanaan kinerja (*Crosscutting*) dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;
4. Memastikan Dokumen pendukung (RENSTRA dan IKU) dapat menjelaskan deskripsi dan cara mengukur indikator kinerja yang jelas yaitu memuat informasi mengenai *what* (deskripsi), *why* (penyebab adanya kinerja tersebut), *when* (target waktu), *where* (lokasi kinerja), *who* (target/sasaran kinerja), *how* (langkah-langkah kinerja), *how much* (berapa biayanya);
5. Memastikan Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja dapat memanfaatkan Teknologi Informasi berupa aplikasi manajemen

kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan PD serta untuk meningkatkan sistem pengukuran kinerja agar lebih efektif dalam membantu organisasi mencapai tujuan yang diinginkan;

6. Memastikan pengukuran kinerja menjadi dasar atas rolling/penempatan pegawai antar bidang dan perbaikan aktivitas dalam pencapaian kinerja yang dibuktikan dengan Nota dinas roling pegawai (bila terdapat roling pegawai), rapat-rapat, daftar hadir dan notulen rapat pembahasan perbaikan aktivitas dalam pencapaian kinerja;
7. Dokumen LKjIP agar dilakukan revidi oleh APIP dengan meminta Laporan Hasil Revidi atau Surat Pernyataan Telah Direvidi.

BAB III PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur



Dr. Intan Nurcahya, S.P., M.Si., CGCAE.
Pembina Tk. I, Gol IV/b
NIP. 19740128 200212 2 006

Paraf Hierarki		
Peran Penugasan	Tanggal	Paraf
Inspektur Pembantu II		
Pengendali Utama		
Pengendali Teknis		A
Ketua Tim		R



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Bumi Praja Anduonohu - Kendari 93232 Telp. (0401) 3135361

Nama Satuan Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama Kepala Satuan Kerja	Parinringi, S.E., M.Si.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Instansi			Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban* 0 s.d. 100 (ikuti petunjuk)	Nilai	Kualitas		
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	85.23	25.57	A		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	100.00	6.00	A		
Kriteria:							
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.						Tersedia SOP/Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.						Tersedia RPJPD dan Perda RPJPD
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.						Tersedia RPJMD dan RENSTRA-P 2018-2023
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.						Tersedia RKPD, RENJA 2023 dan RENJA-P 2023
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.						Tersedia PK 2023, RENAKSI 2023, Jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara berkala
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.						Tersedia RKA 2023, DPA 2023, RKA-P 2023 dan DPA-P 2023
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	78.18	7.04	BB		
Kriteria:							
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.					Dokumen Perencanaan yang disediakan sudah diformalkan, ditetapkan dengan penandatanganan Kepala Unit Kerja dengan pemberian stempel	Tersedia RENSTRA, RENJA-P 2023, RKA 2023, DPA 2023, RKA-P 2023, DPA-P 2023, dan RENAKSI 2023
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.						Tersedia bukti unggah dokumen perencanaan kinerja melalui website OPD dan website E-SAKIP dengan alamat esr.menpan.go.id
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.					Tugas-tugas Pimpinan PD (eselon 2) sudah diturunkan seluruhnya pada unit kerja hingga eselon 4 melalui diagram pohon kinerja sesuai PemenPANRB nomor 89 Tahun 2021	Tersedia Pohon Kinerja 2023 / Diagram Cascading 2023 / Diagram Crosscutting 2023
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.						(1) Tersedia RENSTRA, RENJA 2023 dan RENJA-P 2023, (2) Tujuan sudah sesuai dengan visi dan misi OPD, dan sasaran yang akan dicapai

5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	Dokumen perencanaan sudah memenuhi kriteria SMART	Tersedia RENSTRA dan RENJA-P 2023
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	Target IKU sudah sesuai dengan target kinerja RENSTRA yang akan dicapai.	Tersedia IKU
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (<i>achievable</i>), menantang, dan realistis.	Target minimal yang ditetapkan pada RKPD atau RENJA sudah sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA	Tersedia RENSTRA, RENJA 2023, dan RENJA-P 2023
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	Cascading belum menggambarkan <i>critical success factor</i>	Tersedia Diagram Cascading 2023
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Crosscutting belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain	Tersedia Crosscutting 2023
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		Tersedia PK 2023 dan SKP 2023
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		Tersedia SKP 2023
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00 77.50 11.63 BB	
Kriteria:			
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	Program, kegiatan, dan sub kegiatan sudah memiliki anggaran yang cukup untuk bisa dilaksanakan	Tersedia DPA-P 2023
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	RENAKSI 2023 sudah menguraikan perencanaan hingga sub kegiatan	Tersedia RENAKSI 2023
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .		Tersedia RENAKSI 2023
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		Tersedia RENAKSI 2023 dan Monitoring Evaluasi (Monev) RENAKSI Triwulan 1, 2, 3 dan 4
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	LKjIP sudah menjabarkan kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya di LKjIP untuk menjadi langkah perbaikan yang tertuang di RKPD atau Renja	Tersedia (1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 (2) RKPD 2023, RENJA 2023, dan RENJA-P 2023
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	Renja sudah memuat informasi perbaikan / penyempurnaan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dari target yang direncanakan dalam RPJMD / Renstra seperti inovasi, penambahan program kinerja, atau peningkatan target kinerja	Tersedia RKPD 2023, RENJA 2023, RKPD-P 2023 dan RENJA-P 2023
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		Tersedia PK 2023
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		Tersedia Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional, dan Jabatan Struktural (staf)

2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	68.24	20.47	B		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	90.00	5.40	A		
Kriteria:							
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.						Tersedia Surat Keputusan (SK) petunjuk teknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.					Indikator Kinerja pada Dokumen pendukung sudah menjelaskan deskripsi dan cara mengukur kinerja yang jelas.	Tersedia (1) Peraturan Kepala Daerah/SK OPD tentang IKU; (2) RPJMD dan RENSTRA; (3) RKPD dan RENJA, (4) Dokumen Profil/Manual IKU
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.						Tersedia SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	55.71	5.01	CC		
Kriteria:							
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.					Monev RENAksi sudah melampirkan notulensi / berita acara / lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan OPD (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	Tersedia Monitoring Evaluasi (Monev) RENAksi Triwulan 1, 2, 3 dan 4
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.					Sumber Data Pengukuran Kinerja sudah akuntabel/bisa dihitung tetapi belum menggunakan aplikasi	Tersedia Sumber Data Pengukuran Kinerja
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.					Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah diformulasikan dengan perhitungan yang jelas	Tersedia (1) Sumber Data Pengukuran Kinerja, (2) IKU
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.						Tersedia (1) Laporan Pengukuran Kinerja, (2) Jadwal Pengukuran Kinerja
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.						Tersedia Monitoring Evaluasi (Monev) RENAksi Triwulan 1, 2, 3 dan 4
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					Pengumpulan Data Kinerja belum menggunakan aplikasi	Tersedia Sumber Data Pengumpulan Kinerja
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					Pengukuran Capaian Kinerja belum menggunakan aplikasi	Tersedia (1) Sumber Data Pengukuran Kinerja; dan (2) Laporan Pengukuran Kinerja
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	59.00	8.85	CC		
Kriteria:							
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.					Belum melampirkan Bukti Potongan TPP terkait reward dan punishment	Tersedia Pergub mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Target Pencapaian Kinerja;

[illegible]

1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.					(1) Terdapat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023, (2) LKjIP sudah sesuai PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.					Tersedia (1) PK 2023, (2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.					Tersedia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.					Tersedia (1) RENSTRA, dan (2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.					Tersedia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).					Tersedia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.					Tersedia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.					Tersedia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).					Tersedia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja	7.50	70.00	5.25	B	
Kriteria:						
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).					Tersedia (1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023, (2) Monitoring Evaluasi (Monev) RENAKSI Triwulan 1, 2, 3 dan 4
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.					Tersedia (1) PK 2023, (2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.					Tersedia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.					Tersedia (1) PK 2023, (2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.					Tersedia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.					Tersedia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.					LKjIP sudah memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit Tersedia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / LAKIP 2023

4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	70.00	17.50	B		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	70.00	3.50	B		
Kriteria:							
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.					Belum tersedia Pedoman Teknis Evaluasi AKIP internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dengan mengacu pada PermenPan-RB Nomor 88 tahun 2021
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.					Daftar komponen pada unit kerja/satuan kerja/OPD belum sepenuhnya di evaluasi secara internal	
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	60.00	4.50	CC		
Kriteria:							
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.					(1) Tersedia KKE untuk masing-masing tahapan dalam kerangka logis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, (2) KKE tersebut telah memuat informasi yang memenuhi syarat; relevan, andal, cukup dan bermanfaat.	Evaluasi AKIP menggunakan LKE yang bersumber dari Permenpan 88
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.					(1) Tersedia surat penugasan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, (2) setiap personil dalam tim evaluasi internal tersebut telah memenuhi syarat kompetensi minimal.	Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh SDM dengan pengalaman melakukan evaluasi minimal 3 tahun
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.					Analisa secara mendalam disimpulkan belum memadai karena evaluator internal telah melakukan pengecekan validitas data dan keberadaan data, tetapi data dimaksud tidak dapat ditelusuri karena keterbatasan sumber daya.	Evaluasi AKIP dilaksanakan diawali dengan Bimtek Evaluasi SAKIP kemudian Kegiatan Penyamaan Persepsi antara Tim Evaluator dan Perangkat Daerah
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).					(1) Belum tersedia aplikasi komputer sebagai alat bantu dalam penugasan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, (2) Belum menggunakan Aplikasi khusus untuk Melakukan Evaluasi AKIP	Memanfaatkan Google Drive untuk bisa mengakses pengumpulan data kinerja dan keuangan
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	80.00	10.00	BB		
Kriteria:							
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.					3 Rekomendasi atas Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya sudah di tindaklanjuti	(1) Tersedia Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun Sebelumnya, (2) Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2022

2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.			(1) Tersedia Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun Sebelumnya, (2) Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2022
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	(1) LHE Akuntabilitas Kinerja Internal yang diterbitkan dalam periode evaluasi (2) Tindak lanjut dituangkan dalam bentuk pemenuhan dokumen dan anggaran		(1) Tersedia Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun Sebelumnya, (2) Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2022
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Capaian kinerja setelah pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sudah mempunyai dampak yang positif terhadap efisiensi dan efektifitas kinerja.		(1) Tersedia Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun Sebelumnya, (2) Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2022
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Capaian kinerja setelah pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi untuk meyakinkan apakah mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan kinerja.		(1) Tersedia Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun Sebelumnya, (2) Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2022
TOTAL NILAI (PREDIKAT)		75.94	BB	

MATRIKS LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP 2023 YANG DILAKSANAKAN DI TAHUN 2024

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI/TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENAGGUNGJAWAB	STATUS/PROSES PENYELESAIAN
1.	Menyusun Indikator Kinerja Utama secara berkelanjutan dalam 5 tahun	Menyusun indikator kinerja dalam jangka 5 tahun, melakukan review dan evaluasi tahunan indikator kinerja	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai
2.	Menjamin Pohon kinerja/Cascading yang disusun agar seluruhnya memenuhi prinsip logis/logical framework yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan critical success factor (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi	Melakukan sesi konsultasi dengan pihak terkait, memastikan seluruh cascading diverifikasi oleh tim evaluasi	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai

	kinerja yang ditetapkan					
3.	Menjamin Perencanaan kinerja (Crosscutting) dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Membuat peta hubungan kinerja antar bidang (pohon kerja/cascading, mengintegrasikan strategi dan kebijakan antar bidang, menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin untuk memastikan keselarasan perencanaan kinerja	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai
4.	Memastikan Dokumen pendukung (RENSTRA dan IKU) dapat menjelaskan deskripsi dan cara mengukur indikator kinerja yang jelas yaitu memuat informasi mengenai what (deskripsi), why (penyebab	Menyusun format standar untuk dokumen RENSTRA dan IKU, melakukan review berkala terhadap dokumen pendukung untuk memastikan kelengkapan dan keakuratannya	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai

	adanya kinerja tersebut), when (target waktu), where (lokasi kinerja), who (target/sasaran kinerja), how (langkah-langkah kinerja), how much (berapa biayanya)					
5.	Memastikan Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja dapat memanfaatkan Teknologi Informasi berupa aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan PD serta untuk meningkatkan sistem pengukuran kinerja agar lebih efektif dalam	Memanfaatkan pengelolaan aplikasi manajemen kinerja, melatih staf mengenai penggunaan aplikasi, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin menggunakan aplikasi, memastikan data kinerja yang dikumpulkan akurat dan relevan	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai

	membantu organisasi mencapai tujuan yang diinginkan					
6.	Memastikan pengukuran kinerja menjadi dasar atas rolling/penempatan pegawai antar bidang dan perbaikan aktivitas dalam pencapaian kinerja yang dibuktikan dengan Nota dinas rolling pegawai (bila terdapat rolling pegawai), rapat-rapat, daftar hadir dan notulen rapat pembahasan perbaikan aktivitas dalam pencapaian kinerja	Menyusun kebijakan rolling pegawai berdasarkan hasil pengukuran kinerja, melakukan rolling pegawai sesuai kebijakan, menyelenggarakan rapat evaluasi setelah rolling pegawai, mendokumentasikan hasil rapat dan tindakan perbaikan yang diambil	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai
7.	Dokumen LKJIP agar dilakukan reviu oleh APIP dengan meminta Laporan	Meminta reviu dari APIP secara berkala, menyusun laporan hasil reviu,	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Selesai

	Hasil Reviu atau Surat Pernyataan Telah Direviu	memastikan semua rekomendasi dari APIP ditindaklanjuti, menyimpan dokumen reviu dan surat pernyataan di arsip yang mudah diakses	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra		Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	
--	---	--	---	--	---------------------------------	--

Kendari, 31 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



PARINRINGI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

Nip. 19771014 200312 1 007

Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun n (Jika Ada)

Diisi Scan bukti prestasi Perangkat Daerah Tahun n



